

Judul : Urusan budaya tak jadi prioritas, kalah dari sektor lain
Tanggal : Kamis, 25 September 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Kalah Dari Sektor Lain

Urusan Budaya Tak Jadi Prioritas



Adde Rosi Khoerunnisa

ANGGOTA Komisi X DPR Adde Rosi Khoerunnisa menyayangkan kebudayaan di sejumlah daerah masih belum menjadi urusan prioritas dan kerap kalah dengan sektor lain. Padahal, alokasi anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) non-fisik untuk sektor kebudayaan, termasuk museum dan taman budaya, mencapai sekitar Rp 150 miliar.

Menurut Anggota Fraksi Golkar itu, kebijakan anggaran pusat dan daerah perlu diarahkan agar cagar budaya di berbagai wilayah benar-benar terjaga keberlangsungannya. Dukungan itu penting agar pelestarian budaya tidak hanya berhenti di tataran wacana.

"Makanya, kami mendorong bantuan DAK dari Pemerintah Pusat dan anggaran daerah bisa menjaga keberlangsungan kebudayaan atau cagar budaya di daerah," ujar Ade di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (23/9/2025).

Dia juga menyoroti perlindungan cagar budaya di kawasan hutan lindung, kota, desa tua, hingga kelautan dan perairan. Kawasan-kawasan tersebut bukan hanya bernilai sejarah, tetapi juga menyimpan sumber daya alam dengan potensi ekonomi tinggi jika dikelola dengan baik.

Ade mendorong Kementerian Kebudayaan, BRIN,

dan BPS mengintegrasikan kebijakan perlindungan cagar budaya secara menyeluruh. "Sekaligus untuk tradisi masyarakat dan juga pertambahan nilai ekonomis dari wilayah tersebut masing-masing," ucap legislator asal Dapil Banten 1. Anggota Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih menambahkan, keberagaman budaya adalah kekuatan yang harus dijaga dan dikembangkan melalui inovasi. Kekayaan budaya tiap provinsi memiliki keunikan tersendiri sehingga layak dilestarikan.

Legislator asal Fraksi PKS itu menyebut, pemajuan kebudayaan tidak cukup hanya dengan konservasi. Contohnya seperti wayang, yang kurang menarik apabila hanya dinikmati. Sebaliknya, justru akan lebih menarik apabila adanya inovasi.

Menurutnya, pelestarian harus dibarengi dengan inovasi agar warisan budaya tetap terpelihara, relevan dengan perkembangan zaman, dan tidak kehilangan nilai-nilai aslinya. Dengan begitu, setiap daerah dapat menjaga identitasnya sekaligus memperkuat ketahanan budaya nasional.

Fikri menilai, kebudayaan memiliki peran strategis karena dapat dimanfaatkan untuk membangun karakter bangsa sekaligus meningkatkan ketahanan budaya. Menurutnya, kebudayaan juga mampu mendorong kesejahteraan masyarakat dan memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan internasional.

"Untuk itu, kami juga meminta Pemerintah menunjukkan komitmen dalam pelestarian dan pengembangan budaya nasional," katanya.

Cagar budaya, lanjutnya, harus disertai dengan daya dukung yang memadai, baik dari sisi sarana, regulasi, maupun perhatian Pemerintah. Tanpa dukungan tersebut, masa depan cagar budaya bisa terancam dan bahkan berpotensi mengalami kehancuran. ■ PYB